

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BINJAI 2016



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BINJAI 2016



# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BINJAI 2016**

**ISBN:** 978-602-60683-4-7

**No. Publikasi:** 12760.1711

**Katalog:** 4102004.1276

**Ukuran Buku:** 21,59 cm x 27,94 cm

**Jumlah Halaman:** x + 70 halaman

**Naskah:**

**Badan Pusat Statistik Kota Binjai**

**Penyunting:**

**Badan Pusat Statistik Kota Binjai**

**Gambar Cover oleh:**

**Badan Pusat Statistik Kota Binjai**

**Diterbitkan oleh:**

**© BPS Kota Binjai**

**Dicetak oleh:**

**CV. Rilis Grafika**

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

TIM PENYUSUN

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KOTA BINJAI 2016**

**Penanggung Jawab Umum**

Ir. Ida Suswati, M.Si

**Penanggung Jawab Teknis**

Cornelia Tenar Mannita Tarigan, S.E, M.M

**Penyusun/Penulis**

Herlena Simamora, SST

**Editor**

Deby Ayuningtias, A.Md

Faberlius Hulu, SST

**Cover**

Alfrince Sonifati Hulu, SST



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, di bulan Desember ini Badan Pusat Statistik Kota Binjai telah berhasil menyelesaikan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Binjai Tahun 2016.

Publikasi ini memuat penjelasan dan gambaran mengenai unsur-unsur penyusun kesejahteraan rakyat, meliputi aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan kemiskinan yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik serta beberapa konsep definisi indikator kesejahteraan rakyat.

BPS sebagai penyedia data statistik dasar termasuk data statistik kesejahteraan rakyat berharap agar publikasi ini dapat memberikan manfaat kepada konsumen data baik individu, perusahaan maupun instansi/lembaga yang membutuhkan serta diharapkan pula dengan terbitnya publikasi ini, segenap masyarakat peka akan fenomena yang terjadi di sekitar melalui kesadaran akan pentingnya melek data yang berkualitas.

Demikianlah publikasi ini disusun, kritik dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami harapkan demi penyusunan publikasi yang lebih baik ke depannya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian publikasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dan meridhoi usaha ini, sehingga memberikan manfaat bagi bangsa dan Negara

Binjai, Desember 2017

Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Binjai



**IDA SUSWATI**



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Sumber Data.....	4
1.4. Sistematika Penyajian.....	4
<b>BAB II. METODOLOGI</b> .....	5
2.1. Kependudukan.....	7
2.2. Kesehatan.....	7
2.3. Pendidikan.....	8
2.4. Ketenagakerjaan.....	9
2.5. Taraf dan Pola Konsumsi.....	10
2.6. Perumahan.....	10
<b>BAB III. KEPENDUDUKAN</b> .....	13
3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	16
3.2. Struktur Umur dan Rasio Ketergantungan .....	17
3.3. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio).....	18
3.4. Kepadatan dan Distribusi Penduduk.....	19
3.5. Usia Perkawinan Pertama.....	21
3.6. Keluarga Berencana.....	22
<b>BAB IV. KESEHATAN</b> .....	25
4.1. Angka Kesakitan ( <i>Morbidity Rate</i> ).....	28
4.2. Penolong Kelahiran.....	29

4.3.	Angka Harapan Hidup.....	31
<b>BAB V.</b>	<b>PENDIDIKAN.....</b>	<b>33</b>
5.1.	Angka Partisipasi Sekolah.....	37
5.2.	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	38
5.3.	Angka Buta Huruf.....	39
<b>BAB VI.</b>	<b>KETENAGAKERJAAN.....</b>	<b>41</b>
6.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	44
6.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	45
6.3.	Karakteristik Penduduk Bekerja.....	46
6.3.1.	Lapangan Pekerjaan.....	46
6.3.2.	Status Pekerjaan.....	47
6.3.3.	Pendidikan yang Ditamatkan.....	48
<b>BAB VII.</b>	<b>TARAF DAN POLA KONSUMSI.....</b>	<b>51</b>
7.1	Pengeluaran Rumah Tangga.....	53
<b>BAB VIII.</b>	<b>PERUMAHAN .....</b>	<b>57</b>
8.1.	Kondisi Rumah Tinggal.....	60
8.2.	Fasilitas Rumah Tinggal.....	62
<b>BAB IX.</b>	<b>KEMISKINAN .....</b>	<b>67</b>
9.1.	Perkembangan Penduduk Miskin.....	69

# DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 3.1.	Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Binjai menurut Kecamatan, 2010 & 2016	17
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Kelompok Umur serta Beban Ketergantungan, 2016	18
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kota Binjai menurut Kecamatan, 2016	19
Tabel 3.4.	Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kota Binjai menurut Kecamatan, 2016	20
Tabel 3.5.	Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	21
Tabel 3.6.	Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun Berstatus Kawin menurut Status Penggunaan Alat/cara KB Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	23
Tabel 3.7.	Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun dan Berstatus Kawin menurut Alat/cara KB yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	24
Tabel 4.1.	Persentase Penduduk di Kota Binjai yang Berobat Jalan dan Alasan Utama tidak Berobat Jalan, 2016	29
Tabel 6.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2013-2015*	44
Tabel 6.2.	Jumlah Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/kota dan Kegiatan serta TPT dan TPAK, 2015*	45
Tabel 7.1.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	54
Tabel 7.2.	Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 2016	55
Tabel 8.1.	Kondisi Perumahan di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	61
Tabel 8.2.	Kondisi Fasilitas Rumah di Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	63
Tabel 8.3.	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	64
Tabel 8.4.	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	65
Tabel 9.1.	Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	70

# DAFTAR GRAFIK

		<b>Halaman</b>
Grafik 3.1.	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Binjai (Persen), 2011-2016	16
Grafik 4.1.	Perkembangan Tingkat Morbiditas Penduduk Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	28
Grafik 4.2.	Persentase Wanita 15-49 Tahun Pernah Kawin menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	30
Grafik 4.3.	Perkembangan AHH Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2015-2016	31
Grafik 5.1.	Tingkat Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Binjai, 2016	37
Grafik 5.2.	Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Binjai, 2016	39
Grafik 5.3.	Tingkat Buta Huruf Penduduk Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	40
Grafik 6.1.	Persentase Penduduk Bekerja di Kota Binjai Menurut Status Pekerjaan, 2015*	48
Grafik 6.2.	Persentase Penduduk Bekerja di Kota Binjai Menurut Pendidikan yang ditamatkan, 2015*	49
Grafik 8.1.	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kota Binjai, 2016	60
Grafik 8.2.	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Lantai Terluas Terbuat dari Tanah di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	62
Grafik 8.3.	Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016	65
Grafik 9.1.	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2011-2016	70

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

<https://bimbelkomputerps.go.id>



# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan bangsa merupakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit pembangunan bangsa telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, politik dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan merupakan komitmen seluruh bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan mengenai indikator kesejahteraan rakyat untuk melihat berbagai indikator keluaran pembangunan.

## 1.2. Tujuan

Penulisan Indikator kesejahteraan Rakyat Kota Binjai 2016 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Kota Binjai. Indikator ini dapat dijadikan sebagai kompas yang tepat untuk memonitor pencapaian kesejahteraan rakyat.

Melalui analisis Indikator kesejahteraan Rakyat, perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan input mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada sebagai hasil dan target pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun diharapkan akan semakin efektif dan efisien, utamanya untuk

melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi berdasarkan indikator-indikator yang ada. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan.

### **1.3. Sumber Data**

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan.

### **1.4. Sistematika Penyajian**

Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam sembilan bagian, yaitu:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator kesejahteraan Rakyat Kota Binjai 2016. Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk dan kepadatan/penyebaran penduduk disajikan pada bagian ketiga. Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya, kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi pendidikan di Binjai, dari sisi kualitas pendidikan penduduk pada bagian lima. Aspek ketenagakerjaan dibahas pada bagian enam. Aspek taraf dan pola konsumsi serta perumahan akan dibahas pada bagian tujuh dan delapan. Pembahasan ditutup dengan penyajian indikator kesejahteraan rakyat Kota Binjai 2016 pada aspek kemiskinan yaitu pada bagian sembilan.

# **BAB II**

# **METODOLOGI**

<https://bitukopains.go.id>



# METODOLOGI

## 2.1. Kependudukan

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.
- Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. kekuatan yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan yang mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi faktor kelahiran dan faktor kematian, sedangkan laju pertumbuhan sosial hanya dipengaruhi oleh migrasi.
- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.
- Akseptor aktif adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun.

## 2.2. Kesehatan

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.

- Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.
- Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.

### 2.3. Pendidikan

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal dan non formal (Paket A, B, dan C) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.
- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat

membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

#### **2.4. Ketenagakerjaan**

- Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula dalam pengangguran yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sudah diterima kerja namun belum mulai bekerja dan juga mereka yang sudah merasa putus asa dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.
- Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.
- Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok.
- Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- Jam kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

- Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

## **2.5. Taraf dan Pola Konsumsi**

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan  $30/7 \times 12$ .
- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

## **2.6. Perumahan**

- Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.
- Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
- Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

- Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).
- Air sumur/mata air terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur/mata air tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.



# **BAB III**

# **KEPENDUDUKAN**

<https://bit.ly/kotabuss-go.id>



# KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

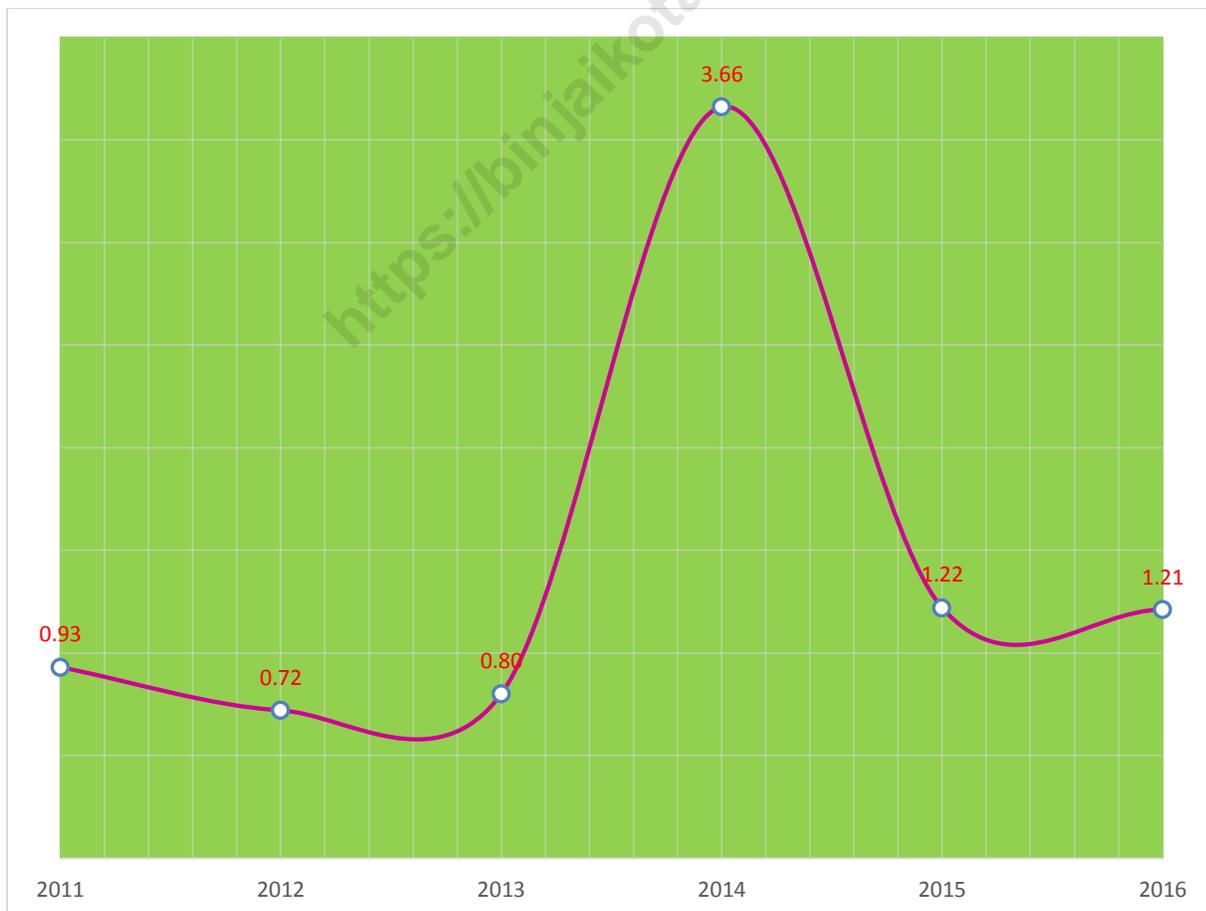
Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

### 3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Binjai tercatat sebesar 246.154 jiwa. Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk selama beberapa tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2011 pertumbuhan penduduk tercatat 0,93 persen kemudian turun menjadi 0,72 persen pada tahun 2012 dan 0,80 pada tahun 2013. Angka laju pertumbuhan penduduk tersebut terus meningkat menjadi 3,66 persen pada tahun 2014 dan turun menjadi 1,22 pada tahun 2015. Selanjutnya tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk Binjai adalah sebesar 1,21 persen (Grafik 3.1). Diproyeksikan pada tahun 2016 jumlah penduduk Binjai berjumlah 267.901 jiwa seperti tercantum pada Tabel 3.2.

Grafik 3.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Binjai (Persen), 2011-2016



Jumlah penduduk Kota Binjai pada tahun 2016 mencapai 267.901 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 1,21 persen. Jumlah rumah tangga yang ada di Kota Binjai sebesar 61.518 rumah tangga dengan dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 4 yang berarti secara rata-rata setiap rumah tangga di Binjai mempunyai anggota rumah tangga sekitar 4 orang.

Pada tabel 3.1 terlihat bahwa Kecamatan Binjai Utara merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling banyak. Pada tahun 2016 penduduk Binjai Utara berjumlah 77.011 jiwa dengan rata-rata anggota rumah tangga sekitar 4 orang. Kecamatan lain yang juga memiliki jumlah penduduk cukup besar adalah Kecamatan Binjai Timur yaitu berjumlah 59.174 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Binjai Kota merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni berjumlah 28.893 jiwa.

Tabel 3.1. Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Binjai menurut Kecamatan, 2010 & 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	2010	2016
(1)	(2)	(3)
<i>Binjai Selatan</i>	48.423	54.422
<i>Binjai Kota</i>	30.190	28.893
<i>Binjai Timur</i>	53.926	59.174
<i>Binjai Utara</i>	70.392	77.011
<i>Binjai Barat</i>	43.223	48.401
<b><i>Binjai</i></b>	<b>246.154</b>	<b>267.901</b>

Sumber : Kota Binjai dalam Angka 2017

### 3.2. Struktur Umur dan Rasio Ketergantungan

Struktur umur penduduk dibedakan kedalam tiga kelompok, yaitu: kelompok umur muda (dibawah 15 tahun), kelompok umur produktif (15-64 tahun), dan kelompok umur tua (65 tahun keatas). Pada tahun 2016 sebagian besar penduduk Kota Binjai adalah kelompok usia produktif (15-64 tahun), karena mencapai 182.545 jiwa atau 68,14 persen,

kemudian kelompok anak-anak (0-14 tahun) mencapai 74.231 jiwa atau 27,71 persen dan kelompok lanjut usia (65 tahun ke atas) mencapai 11.125 jiwa atau 4,15 persen.

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Kelompok Umur serta Beban Ketergantungan, 2016**

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
< 15	37.978	36.253	74.231
15 - 64	90.635	91.910	182.545
65 +	5.079	6.046	11.125
<b>Jumlah</b>	<b>133.692</b>	<b>134.209</b>	<b>267.901</b>
<b>Rasio Ketergantungan</b>			<b>46,76</b>

*Sumber: Kota Binjai Dalam Angka 2017*

Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa rasio ketergantungan Kota Binjai tahun 2016 termasuk dalam kategori sedang yaitu sebesar **46,76** persen, artinya setiap seratus orang berusia kerja/produktif di Kota Binjai mempunyai tanggungan sebanyak 46 atau 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

### 3.3. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2016 diketahui jumlah penduduk Binjai adalah sebesar 267.901 jiwa yang terdiri dari 133.692 jiwa laki-laki dan perempuan 134.209 jiwa atau dengan sex ratio sebesar 99,61 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 atau 100 penduduk laki-laki.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kota Binjai menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binjai Selatan	26.894	27.528	54.422	97,70
Binjai Kota	14.130	14.763	28.893	95,71
Binjai Timur	29.393	29.781	59.174	98,70
Binjai Utara	38.637	38.374	77.011	100,69
Binjai Barat	24.638	23.763	48.401	103,68
<b>Binjai</b>	<b>133.692</b>	<b>134.209</b>	<b>267.901</b>	<b>99,61</b>

Sumber : Kota Binjai dalam Angka 2017

### 3.4. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Salah satu masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah, sehingga kepadatan untuk masing-masing Kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah perdesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga tidak heran jika daerah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Dilihat dari kepadatan penduduk, kecamatan yang

memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Binjai Kota yang mencapai 7.013 jiwa per km<sup>2</sup>. Dengan luas wilayah terkecil di antara kecamatan-kecamatan lainnya yaitu hanya seluas 4,12 km<sup>2</sup>. Kecamatan Binjai Kota merupakan sasaran hunian masyarakat karena merupakan pusat perkotaan di Kota Binjai. Adapun kepadatan penduduk di kecamatan lain adalah Kecamatan Binjai Barat yaitu sebesar 4.457 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan Binjai Utara yaitu sebesar 3.265 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan Binjai Timur yaitu sebesar 2.727 jiwa per km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk terendah ada di kecamatan Binjai Selatan yang hanya mencapai 1.816 jiwa per km<sup>2</sup>.

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kota Binjai menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Distribusi Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Binjai Selatan	54.422	1.816	20,31
Binjai Kota	28.893	7.013	10,78
<b>Binjai Timur</b>	59.174	2.727	22,09
Binjai Utara	77.011	3.265	28,75
Binjai Barat	48.401	4.457	18,07
<b>Binjai</b>	<b>267.901</b>	<b>2.969</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kota Binjai dalam Angka 2017

### 3.5. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perkawinan. Pertama, menunjukkan perubahan status dari belum kawin menjadi berstatus kawin. kedua, perubahan dari status cerai menjadi status kawin. Dalam kaitan dengan sub bagian ini, defenisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan sampai dengan masa menopause. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap mempengaruhi panjangnya masa reproduksi. Semakin muda seorang wanita menikah, maka semakin panjang usia reproduksinya dan semakin besar pula kemungkinannya melahirkan anak.

Berdasarkan Tabel 3.5 sebagian besar usia saat perkawinan pertama adalah 19-24 tahun (57,61 persen) kemudian diikuti usia 25-34 tahun (23,77 persen) dan usia 17-18 tahun (10,40 persen). Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa masih ada sebanyak 5,44 persen wanita berumur 10 tahun ke Atas yang usia pada perkawinan pertamanya di bawah 17 tahun dan dinilai masih terlalu muda.

Tabel 3.5. Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016

Usia Perkawinan Pertama	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
10 – 16	4,82	5,44
17 – 18	14,85	10,40
19 – 24	58,49	57,61
25 – 34	20,63	23,77
35 +	1,21	2,78

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Dibandingkan dengan Kota Binjai, sebagian besar usia saat perkawinan usia pertama Provinsi Sumatera Utara adalah 19-24 tahun sebesar 58,49 persen, kemudian diikuti usia 25-34 tahun (20,63 persen), usia 17-18 tahun (14,85 persen), usia 10-16 (4,82 persen), dan usia 35+ (1,21 persen). Persentase penduduk wanita kota Binjai yang usia perkawinan pertamanya 10-18 tahun sebanyak 15,84 persen, lebih kecil dibanding Propinsi Sumatera Utara (19,67 persen). Padahal usia yang terbaik untuk menikah menurut BKKBN berusia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun laki-laki. Pernikahan dini banyak membawa kerugian bagi wanita, dari sisi psikologis, fisik maupun biologis. Dari sisi psikologis, belum siapnya menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang dewasa. Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang. Selain itu, remaja yang menikah dini baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak. Sehingga kemungkinan anak dan ibu meninggal saat melahirkan lebih tinggi.

### **3.6. Keluarga Berencana**

Upaya penurunan tingkat fertilitas di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan cukup lama. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan percepatan yang semakin melambat. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama.

Pasangan suami dan isteri, dengan usia istri antara 15-49 tahun merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang wanita sedang berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan, sehingga untuk mencapai sasaran atau

tujuan yang telah ditargetkan, perlu dilihat tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para akseptor.

Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin, yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB Kota Binjai pada tahun 2016 sebesar 47,48 persen, lebih tinggi dibanding Provinsi Sumatera Utara sebesar 45,59 persen. Dari persentase wanita usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB tersebut di antaranya menggunakan alat/cara suntik (34,70 persen), pil KB (33,11 persen), spiral (10,35 persen), susuk KB & implan (7,52 persen), MOW (5,49 persen), kondom (2,90 persen) dan lainnya (5,92 persen). Tingginya persentase pemakaian alat/cara suntik secara keseluruhan, disebabkan karena alat/cara tersebut sangat disukai dan mudah pemakaiannya.

Tabel 3.6. Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun Berstatus Kawin menurut Status Penggunaan Alat/cara KB Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016

<b>Status Penggunaan</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>Binjai</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Sedang menggunakan	45,59	47,48
Tidak menggunakan lagi	11,61	11,25
Tidak pernah menggunakan	42,80	41,27
<b>Sumatera Utara</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016*

Tabel 3.7. Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun dan Berstatus Kawin menurut Alat/cara KB yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016

<b>Status Penggunaan</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>Binjai</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
MOW/MOP	9,11	5,49
IUD/AKDR/Spiral	3,81	10,35
Suntik	47,55	34,70
Susuk KB & implan	8,73	7,52
Pil KB	23,97	33,11
Kondom/Intravag	2,09	2,90
Lainnya	4,74	5,92
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

# **BAB IV**

# **KESEHATAN**

<https://buku.kemdiknas.go.id>



# KESEHATAN

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya.

Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama pembangunan manusia. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata karena memang salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti Puskesmas, Posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

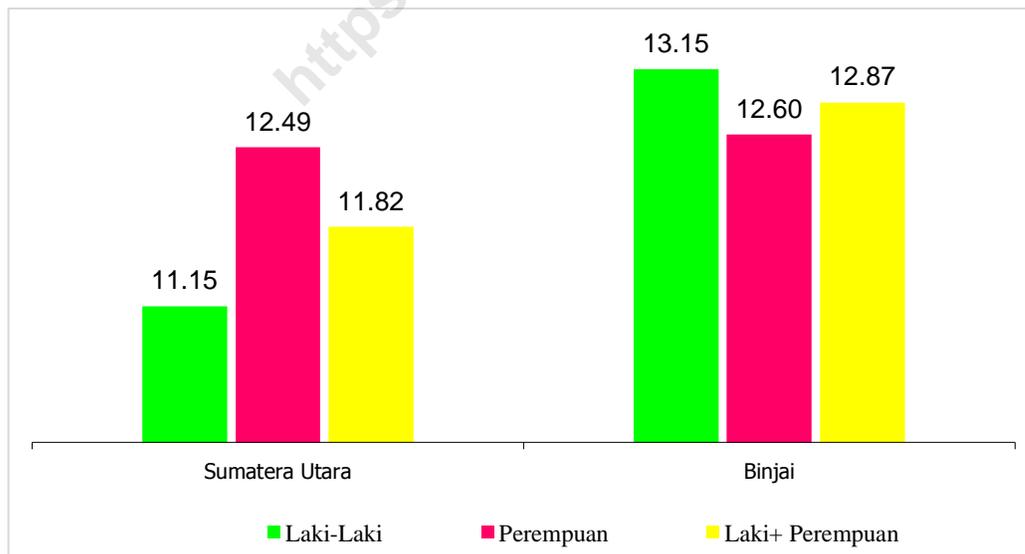
Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

#### 4.1. Angka kesakitan (*Morbidity Rate*)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu atau mengalami sakit. Tingkat kesakitan ini selain secara umum, dapat juga keluhan menurut jenis penyakit.

Tingkat morbiditas di Kota Binjai lebih tinggi dibanding Provinsi Sumatera Utara. Tingkat morbiditas Kota Binjai sebesar 12,87 persen dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 11,82 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, terdapat pola yang berbeda antara Kota Binjai dan Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Utara umumnya perempuan lebih banyak menderita sakit, persentase penduduk perempuan yang menderita sakit yaitu 12,49 persen lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki sebesar 11,15 persen. Berbeda dengan Provinsi Sumatera Utara, tingkat morbiditas penduduk perempuan di Kota Binjai yaitu 12,60 persen, lebih rendah dari pada tingkat morbiditas laki-laki yaitu sebesar 13,15 persen.

Grafik 4.1. Perkembangan Tingkat Morbiditas Penduduk Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016



Berbagai upaya dilakukan penduduk untuk menjaga kesehatan, baik secara mandiri maupun oleh keluarganya yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap.

Berobat sendiri merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya, dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Adapun rawat inap adalah proses penyembuhan penyakit yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang mendukung, dibawah pendampingan dan pengawasan petugas kesehatan yang kompeten. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya cara berobat dengan mengobati sendiri sebenarnya tidak direkomendasikan.

Pada Tabel 4.1. diketahui bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kemudian berobat jalan untuk mengobati sakitnya adalah sebesar 56,73 persen. Kemudian jika ditelusuri kembali terkait alasan kenapa tidak berobat jalan, memang pilihan untuk berobat sendiri berdasarkan pengetahuannya untuk mengobati penyakit merupakan penyebab utama yakni mencapai 74,14 persen. Penyebab lainnya yang cukup besar adalah merasa tidak perlu dan permasalahan biaya. Terkait dengan permasalahan biaya sebenarnya saat ini pemerintah telah menyusun Undang-undang terkait jaminan sosial.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk di Kota Binjai yang Berobat Jalan dan Alasan Utama tidak Berobat Jalan, 2016

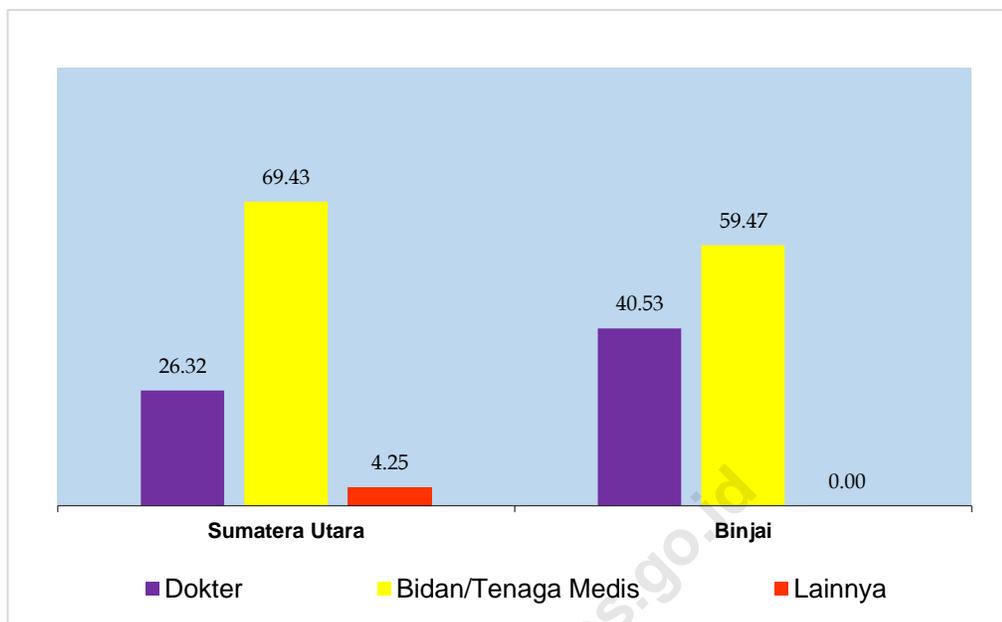
Jenis Kelamin	Persentase yang Berobat Jalan	Alasan Utama tidak Berobat Jalan			
		Tidak punya biaya berobat	Mengobati Sendiri	Merasa tidak perlu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)
Laki-laki	60,55	2,57	74,99	16,91	5,54
Perempuan	52,93	4,52	73,44	15,32	6,72
Laki-Laki +Perempuan	56,73	3,63	74,14	16,04	6,18

## 4.2. Penolong Kelahiran

Salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga media seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu.

Pada tahun 2016 penolong kelahiran balita di Binjai pada umumnya adalah bidan/tenaga medis lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dimana penolong kelahiran anak lahir hidup terakhirnya ditolong oleh bidan/tenaga medis lainnya adalah sebesar 59,47 persen. Tingginya persentase kelahiran yang ditolong oleh bidan, sangat mungkin disebabkan ketersediaan dan tingkat kepercayaan terhadap bidan relatif tinggi. Tenaga penolong kelahiran lainnya yang cukup tinggi adalah dokter terutama di daerah perkotaan. Dokter sebagai penolong kelahiran di Binjai sebesar 40,53 persen lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 26,32 persen.

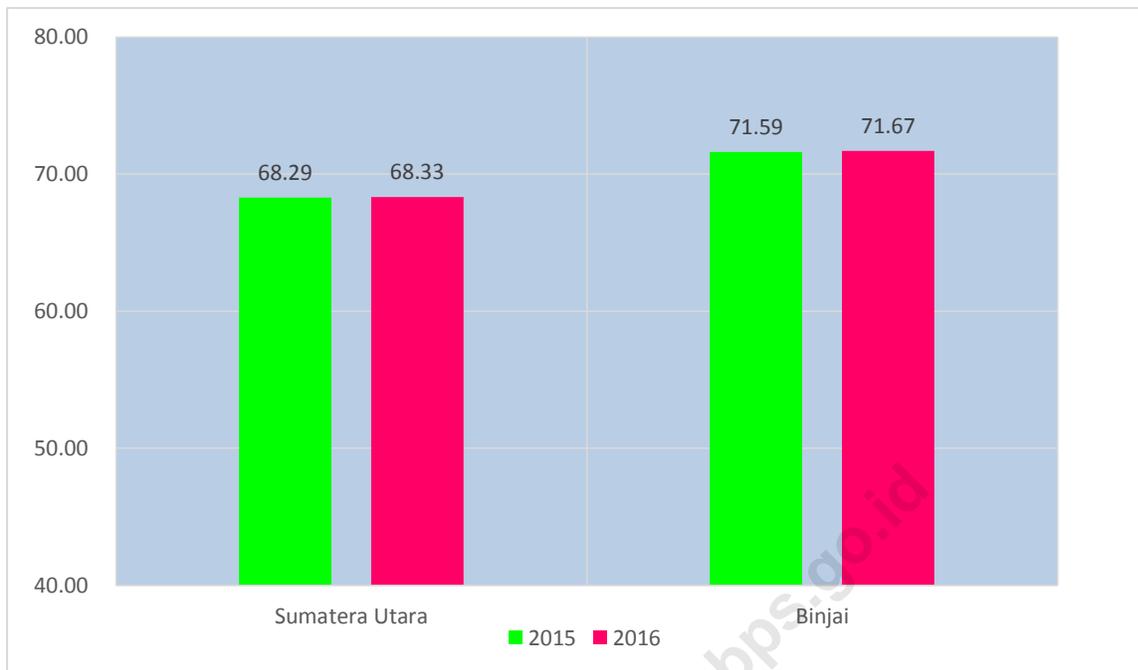
Grafik 4.2. Persentase Wanita 15-49 Tahun Pernah Kawin menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016



### 4.3. Angka Harapan Hidup

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Grafik 4.3. menunjukkan Perkembangan AHH Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2015-2016. AHH Kota Binjai lebih tinggi dari AHH Provinsi Sumatera Utara. Meskipun demikian, AHH Binjai mengalami peningkatan 0,08 point dari 71,59 di Tahun 2015 menjadi 71,67 pada tahun 2016.

Grafik 4.3. Perkembangan AHH Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2015-2016



Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

# **BAB V**

# **PENDIDIKAN**

<http://www.jakarta.bps.go.id>



# PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan

suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari Pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang memadai dan juga ditunjang dengan kemampuan masyarakat, karena sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, yaitu banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Di tengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. kebijaksanaan lain sebagai upaya

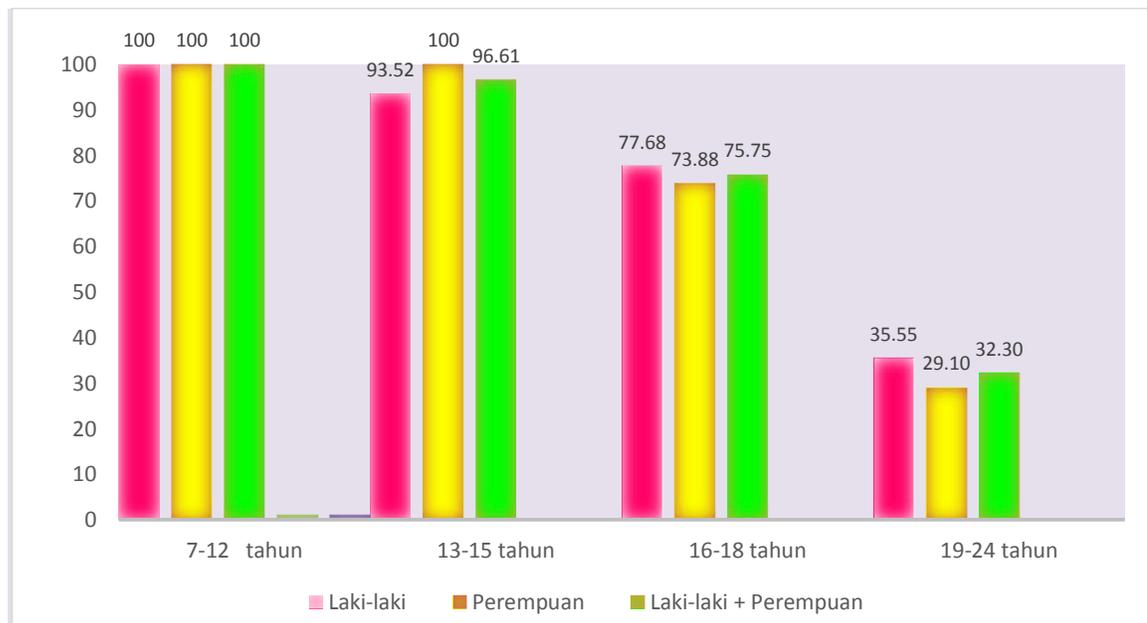
untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program di luar pendidikan formal, di antaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh.

Program atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

### 5.1. Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi

Grafik 5.1. Tingkat Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Binjai, 2016



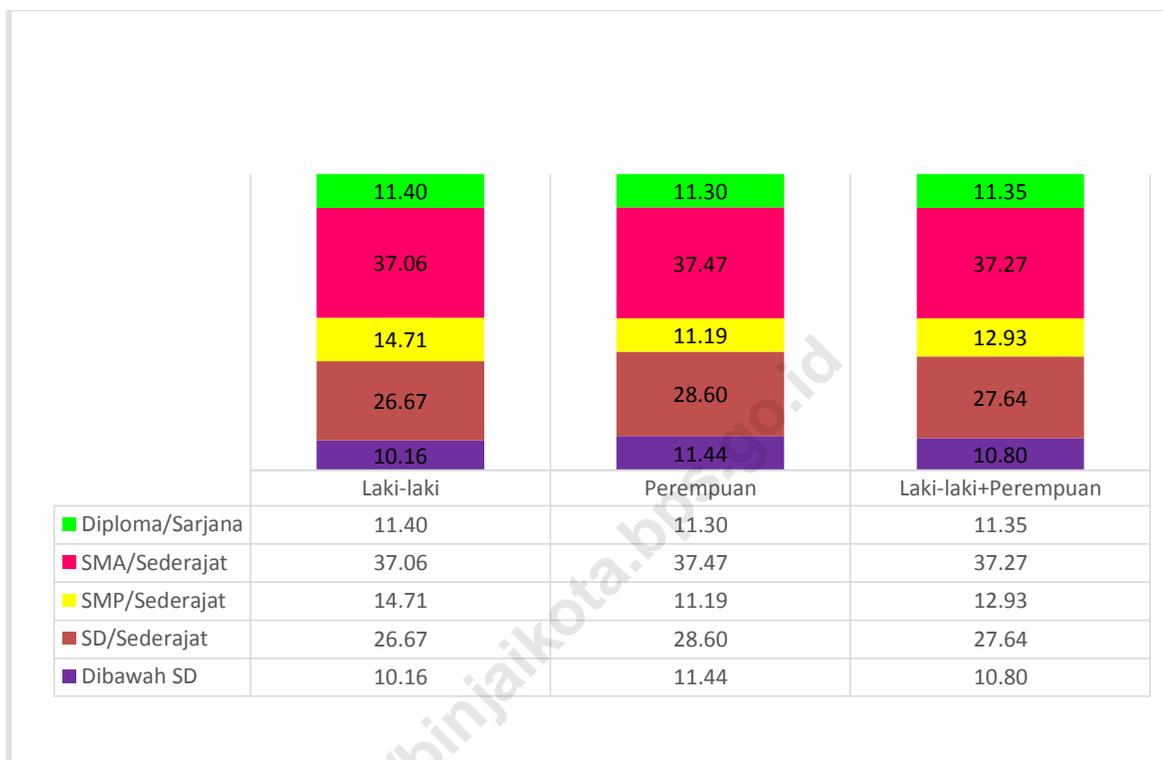
Grafik 5.1. menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk Kota Binjai. Pada usia 7-12 tahun tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan (100 persen) sama dengan tingkat partisipasi sekolah penduduk laki-laki (100,00 persen) di tahun 2016. Pada usia 13-15 tahun tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan (100 persen) lebih besar daripada tingkat partisipasi sekolah penduduk laki-laki (93,52). Berbeda halnya dengan kelompok umur 16-18 dan 19-24 tahun dimana tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan lebih kecil daripada penduduk laki-laki.

## **5.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.

Berdasarkan Grafik 5.2., persentase penduduk laki-laki 10 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA/Sederajat di Kota Binjai pada tahun 2016 adalah sebanyak 37,06 persen lebih rendah dibanding perempuan yaitu 37,47 persen. Sebaliknya, persentase penduduk laki-laki yang berpendidikan Diploma/ Sarjana (11,40 persen) lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk perempuan (11,30 persen).

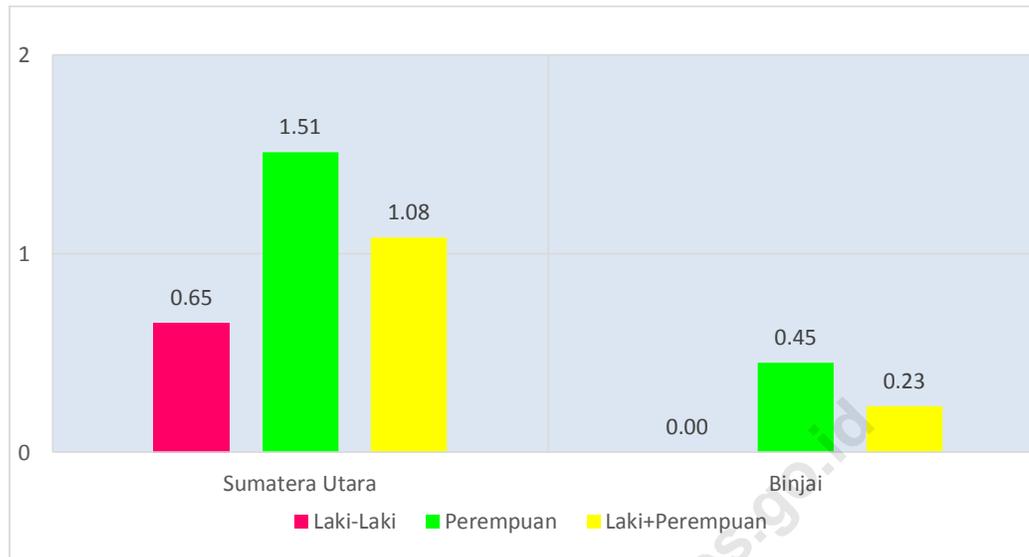
Grafik 5.2 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Binjai, 2016



### 5.3. Angka Buta Huruf

Indikator makro yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis atau sebaliknya (buta huruf) untuk penduduk 10 tahun. Tingkat buta huruf dapat dijadikan sebagai indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan bahwa dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu melek huruf dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dan kemajuan suatu bangsa.

Grafik. 5.3. Tingkat Buta Huruf Penduduk Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016



Tahun 2016, tingkat buta huruf penduduk laki-laki Kota Binjai lebih rendah dari Provinsi Sumatera Utara dengan selisih 0,65 persen. Sama halnya dengan tingkat buta huruf penduduk perempuan Kota Binjai dengan selisih 1,06 persen. Hal yang cukup menarik adalah tingginya tingkat buta huruf perempuan dibanding laki-laki. Pada tahun 2016 tingkat buta huruf perempuan Kota Binjai mencapai 0,45 persen. Kondisi Provinsi Sumatera Utara tidak berbeda dengan Kota Binjai yaitu tingkat buta huruf perempuan masih lebih tinggi yaitu 1,51 persen dibanding laki-laki sebesar 0,65 persen.

# **BAB VI**

# **KETENAGAKERJAAN**

<https://bit.ly/kontrolbps-go.id>



# KETENAGAKERJAAN

Secara teori, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*economically active*) didefinisikan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Penduduk yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (*uneconomically active*) adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertumbuhan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), dan tingkat pengangguran. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

Tabel 6.1. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2013-2015\*

Kegiatan	2013		2014		2015	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Angkatan kerja</b>	<b>111.287</b>	<b>61,74</b>	<b>120.311</b>	<b>63,85</b>	<b>125.172</b>	<b>65,44</b>
- Bekerja	103.682	57,52	111.172	59,00	112.661	58,90
- Pengangguran	7.605	4,22	9.139	4,85	12.511	6,54
<b>Bukan Angkatan kerja</b>	<b>68.971</b>	<b>38,26</b>	<b>68.113</b>	<b>36,15</b>	<b>66.115</b>	<b>34,56</b>
<b>Jumlah</b>	<b>180.258</b>	<b>100</b>	<b>188.424</b>	<b>100</b>	<b>191.287</b>	<b>100</b>
<b>T P A K (%)</b>	<b>61,74</b>		<b>63,85</b>		<b>65,44</b>	
<b>TPT (%)</b>	<b>6,83</b>		<b>7,60</b>		<b>10,00</b>	

Sumber : Sakernas Agustus 2013-2015

\*) Data 2016 tidak tersedia

## 6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja di Binjai adalah 191.287 orang, terdiri dari 125.172 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 66.115 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya TPAK merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja. TPAK Binjai 2015 adalah sebesar 65,44 persen, artinya bahwa pada tahun 2015 sebanyak 65,44 persen penduduk usia kerja di Binjai siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

Jika dilihat perkembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Binjai menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013, TPAK Binjai 61,74 persen, kemudian naik menjadi 63,85 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 65,44 persen.

## 6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 di Binjai sebesar 10,00 persen, meningkat dibanding tahun 2014 (7,60 persen) demikian juga dibanding Tahun 2013 (6,83 persen).

Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/kota dan Kegiatan serta TPT dan TPAK, 2015\*

Kota/Kota	Angkatan kerja			Bukan Angkatan kerja	Penduduk 15+	TPT	TPAK
	Bekerja	Pengangguran	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Kota</b>							
1..Nias	68.820	642	69.462	11.572	80.034	0,92	85,72
2..Mandailing Natal	191.616	11.750	203.366	74.880	278.246	5,78	73,09
3. Tapanuli Selatan	128.123	8.054	136.177	40.967	177.144	5,91	76,87
4. Tapanuli Tengah	158.273	8.288	166.561	52.770	219.331	4,98	75,94
5. Tapanuli Utara	153.301	4.029	157.330	30.922	188.252	2,56	83,57
6. Toba Samosir	91.269	3.277	94.546	23.223	117.769	3,47	80,28
7. Labuhanbatu	163.324	20.999	184.323	123.157	307.480	11,39	59,95
8. Asahan	276.998	17.120	294.118	186.820	480.938	5,82	61,16
9. Simalungun	389.413	23.741	413.154	175.137	588.291	5,75	70,23
10. Dairi	151.557	1.930	153.487	24.062	177.549	1,26	86,45
11. Karo	223.122	5.085	228.207	39.493	267.700	2,23	85,25
12. Deli Serdang	810.620	55.277	865.897	548.367	1.414.264	6,38	61,23
13. Langkat	417.906	36.444	454.350	249.955	704.305	8,02	64,51
14. Nias Selatan	147.863	596	148.459	39.748	188.207	0,40	78,88
15. Humbang Hasundutan	97.151	1.197	98.348	14.561	112.909	1,22	87,10
16. Pakpak Barat	23.879	709	24.588	3.428	28.016	2,88	87,76
17. Samosir	69.373	899	70.272	9.237	79.509	1,28	88,38
18. Binjai	245.891	19.011	264.902	155.231	420.133	7,18	63,05
19. Batubara	145.679	9.835	155.514	113.920	269.434	6,32	57,72
20. Padang Lawas Utara	114.643	6.047	120.690	34.843	155.533	5,01	77,60
21. Padang Lawas	107.923	6.827	114.750	44.908	159.658	5,95	71,87
22. Labuhanbatu Selatan	131.746	5.698	137.444	65.477	202.921	4,15	67,73
23. Labuhanbatu Utara	141.176	13.533	154.709	76.411	231.120	8,75	66,94
24. Nias Utara	61.297	2.566	63.863	16.845	80.708	4,02	79,13
25. Nias Barat	42.615	1.301	43.916	7.568	51.484	2,96	85,30
<b>Kota</b>							
71. Sibolga	36.845	4.210	41.055	17.559	58.614	10,25	70,04
72. Tanjungbalai	64.659	7.234	71.893	38.995	110.888	10,06	64,83
73. Pematangsiantar	110.785	11.593	122.378	55.938	178.316	9,47	68,63
74. Tebing Tinggi	63.001	7.361	70.362	41.669	112.031	10,46	62,81
75. Medan	875.794	108.243	984.037	648.453	1.632.490	11,00	60,28

76. Binjai	112.661	12.511	125.172	66.115	191.287	10,00	65,44
77. Padangsidempuan	91.385	6.835	98.220	45.641	143.861	6,96	68,27
78. Gunungsitoli	53.596	5.952	59.548	30.004	89.552	10,00	66,50
<b>Sumatera Utara</b>	<b>5.962.304</b>	<b>428.794</b>	<b>6.391.098</b>	<b>3.107.876</b>	<b>9.498.974</b>	<b>6,71</b>	<b>67,28</b>

Sumber : Sakernas Agustus 2015

\*) Data 2016 tidak tersedia

Hal yang cukup menarik jika mencermati TPT menurut kabupaten/kota, daerah kota umumnya memiliki TPT relatif tinggi dan umumnya diatas atau mendekati 10 persen, sebaliknya di daerah kabupaten umumnya rendah. TPT tertinggi terdapat di Kota Medan yaitu sebesar 11,00 persen dan yang terendah adalah TPT Kota Nias Selatan sebesar 0,40. Hal ini dapat dipahami bahwa di kabupaten pada umumnya merupakan daerah pertanian, dan tidak sulit untuk bekerja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Berbeda di kota dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, penduduk usia kerja umumnya lebih selektif untuk mencari pekerjaan, selain karena sudah terbatasnya lahan pertanian.

### 6.3. Karakteristik Penduduk Bekerja

#### 6.3.1. Lapangan Pekerjaan

Sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi penyerapan tenaga kerja di Kota Binjai. Pada tahun 2014 sebanyak 32,36 persen penduduk Binjai berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor perdagangan besar, rumah makan dan hotel, kemudian diikuti sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 25,10 persen, konstruksi sebesar 14,23 persen, dan sektor lainnya hanya dibawah 10 persen.

Pada tahun 2015 kondisinya relatif sama, yaitu perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel masih mendominasi yaitu sebesar 68,97 persen, diikuti sektor pertambangan dan penggalan sebesar 24,69 persen serta sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 6,34 persen. Besarnya peran sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel dalam perekonomian Binjai karena memang Binjai memiliki potensi perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel dengan kondisi perkotaan dimana penduduknya sudah maju dan beralih dari sektor pertanian.

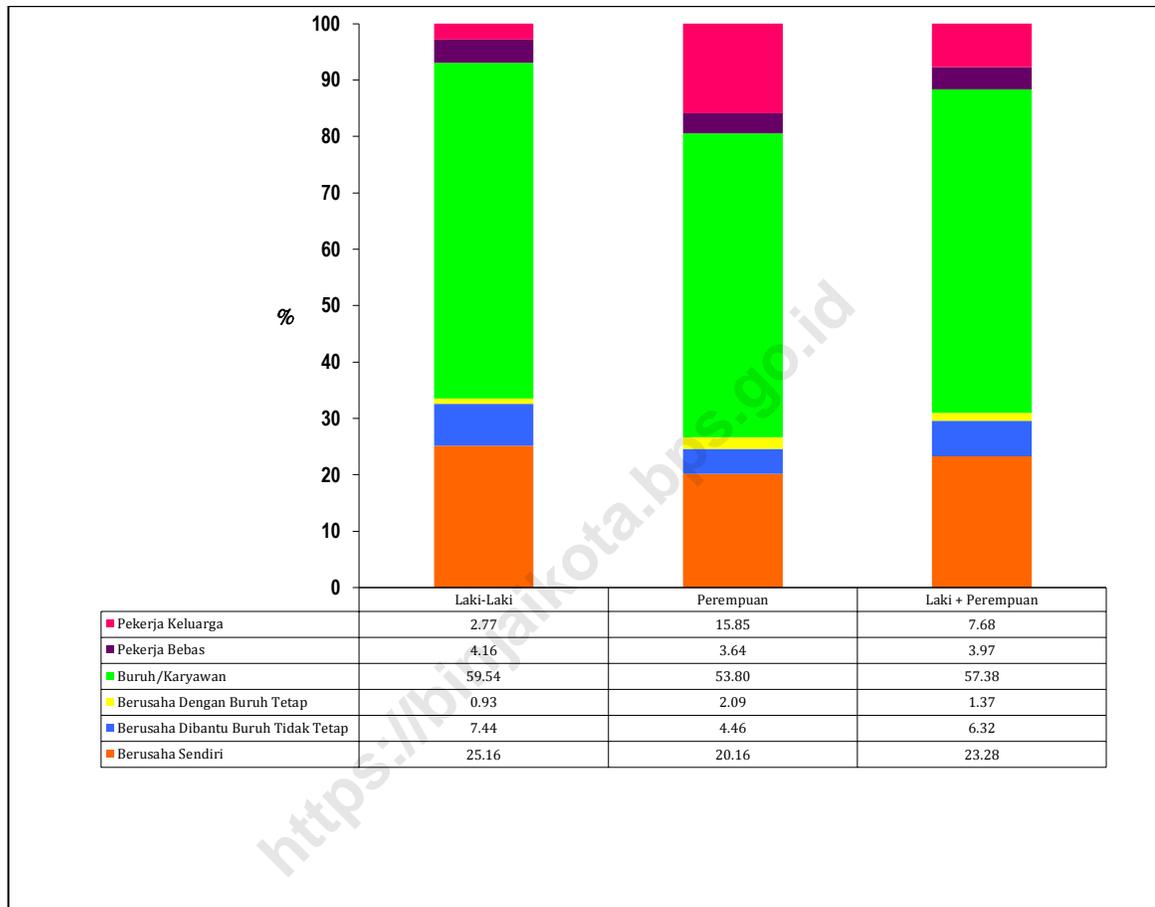
### 6.3.2. Status Pekerjaan

Status pekerjaan dibedakan menjadi 6 macam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja keluarga. Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tersebut.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif '*tradisional*'. Sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern, lebih banyak buruh atau karyawan dan pengusaha dengan buruh tetap. Pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama di kalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.

Pada umumnya penduduk Kota Binjai bekerja sebagai buruh/karyawan. Grafik 6.1. menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 57,38 persen pekerja di Kota Binjai berstatus buruh/karyawan, kemudian diikuti oleh berusaha sendiri (23,28 persen). Jika dilihat menurut gender, persentase penduduk laki-laki yang menjadi pekerja keluarga sangat sedikit yaitu hanya 2,77 persen sementara persentase penduduk perempuan yang menjadi pekerja keluarga cukup tinggi yaitu 15,85 persen.

Grafik 6.1. Persentase Penduduk Bekerja di Kota Binjai Menurut Status Pekerjaan, 2015\*



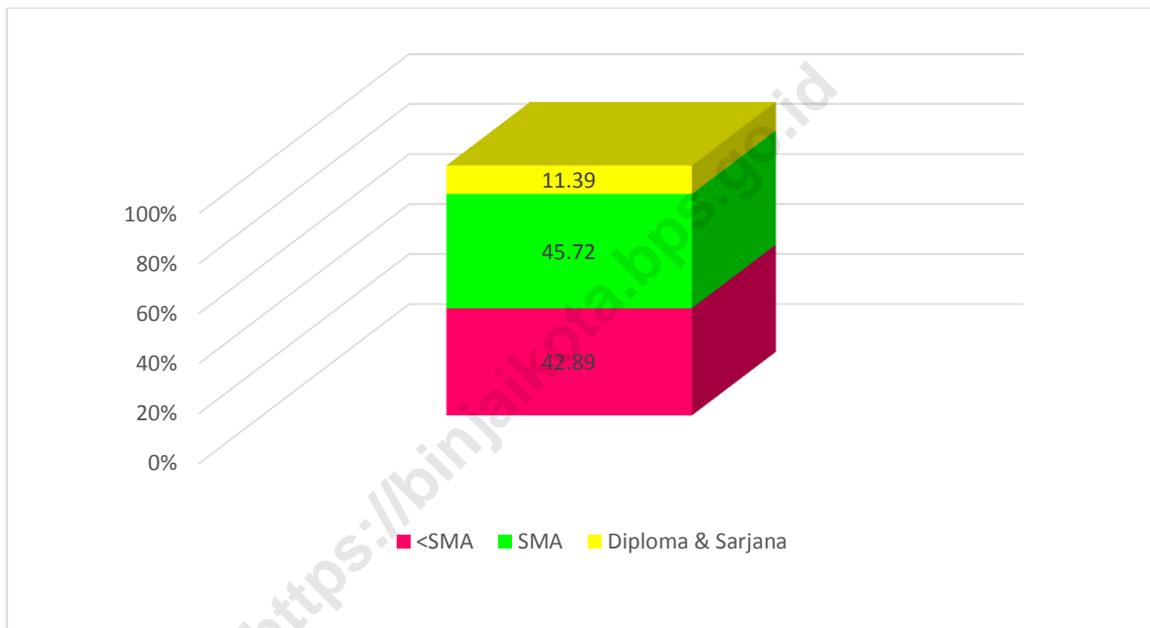
\*) Data 2016 tidak tersedia

### 6.3.3. Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih dipakai sebagai patokan untuk mengelompokkan seorang pekerja, apakah ia termasuk pekerja profesional atau pekerja kasar. Seorang pekerja dikatakan sebagai pekerja profesional (*white collar worker*) bila suatu pekerjaan yang untuk menyelesaikannya memerlukan penguasaan dan penerapan teori ilmu pengetahuan. Sebaliknya dikatakan pekerja kasar (*blue collar worker*) bila suatu pekerjaan hanya memerlukan tenaga atau ketrampilan tertentu.

Grafik 6.2. menunjukkan bahwa pada tahun 2015 penduduk bekerja di Kota Binjai didominasi oleh penduduk yang mempunyai pendidikan tertinggi SMA, yaitu sebesar 45,72 persen. Kemudian penduduk yang pendidikan tertinggi lebih kecil dari SMA sebesar 42,89 persen dan yang paling sedikit adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi diploma & sarjana sebesar 11,39 persen.

Grafik 6.2. Persentase Penduduk Bekerja di Kota Binjai Menurut Pendidikan yang ditamatkan, 2015\*



*\*) Data 2016 tidak tersedia*



**BAB VII**  
**TARAF DAN POLA**  
**KONSUMSI**



# TARAF DAN POLA KONSUMSI

## 7.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Binjai terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2016 sebesar Rp. 996.842,-, terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 506.866,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp. 489.976,-. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Binjai masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan).

Tabel 7.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016

Daerah	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera Utara	472.219	55,31	381.537	44,69	853.756	100
Binjai	506.866	50,85	489.976	49,15	996.842	100

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga di daerah perdesaan di Sumatera Utara lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu 61,09 persen untuk daerah perdesaan dan 50,97 persen untuk daerah perkotaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah perdesaan masih cenderung menggunakan pendapatan rumah tangganya untuk keperluan konsumsi makanan. Sedangkan di daerah perkotaan, porsi untuk konsumsi makanan sudah mulai dialihkan kepada keperluan lain di luar konsumsi makanan. Ini merupakan salah satu indikator bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah perkotaan relatif lebih baik dibanding di perdesaan.

Persentase pengeluaran untuk makanan di daerah kabupaten relatif lebih tinggi dibandingkan daerah kota. Persentase tertinggi di Kabupaten Nias Utara (65,05 persen), diikuti Kabupaten Nias Barat (64,17 persen) dan Kabupaten Dairi (64,04 persen). Sedangkan persentase pengeluaran untuk makanan terendah terdapat di Kota Medan (46,09 persen) dan Kota Pematangsiantar (49,21 persen).

Tabel 7.2. Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 2016

Kota/kota	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nias	63,43	36,57	100,00
2. Mandailing Natal	63,46	36,54	100,00
3. Tapanuli Selatan	63,67	36,33	100,00
4. Tapanuli Tengah	60,55	39,45	100,00
5. Tapanuli Utara	63,59	36,41	100,00
6. Toba Samosir	62,40	37,60	100,00
7. Labuhanbatu	56,20	43,80	100,00
8. Asahan	56,52	43,48	100,00
9. Simalungun	57,10	42,90	100,00
10. Dairi	64,04	35,96	100,00
11. Karo	61,40	38,60	100,00
12. Deli Serdang	54,95	45,05	100,00
13. Langkat	58,19	41,81	100,00
14. Nias Selatan	62,80	37,20	100,00
15. Humbang Hasundutan	60,49	39,51	100,00
16. Pakpak Barat	60,78	39,22	100,00
17. Samosir	61,51	38,49	100,00
18. Binjai	60,21	39,79	100,00
19. Batubara	57,77	42,23	100,00
20. Padang Lawas Utara	62,32	37,68	100,00
21. Padang Lawas	56,52	43,48	100,00
22. Labuhanbatu Selatan	57,56	42,44	100,00
23. Labuhanbatu Utara	59,53	40,47	100,00
24. Nias Utara	65,05	34,95	100,00
25. Nias Barat	64,17	35,83	100,00
71. Sibolga	53,15	46,85	100,00
72. Tanjungbalai	57,36	42,64	100,00
73. Pematangsiantar	49,21	50,79	100,00
74. Tebing Tinggi	53,11	46,89	100,00
75. Medan	46,09	53,91	100,00
76. Binjai	50,85	49,15	100,00
77. Padangsidimpuan	53,35	46,65	100,00
78. Gunungsitoli	55,04	44,96	100,00
<b>Sumatera Utara</b>	<b>55,31</b>	<b>44,69</b>	<b>100,00</b>
• <b>Perkotaan</b>	<b>50,97</b>	<b>49,03</b>	<b>100,00</b>
• <b>Perdesaan</b>	<b>61,09</b>	<b>38,91</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016



# **BAB VIII**

# **PERUMAHAN**

<https://bidjkrkota.kps.go.id>



# PERUMAHAN

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 yang mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi tugas bagi negara yang penyelenggaraan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

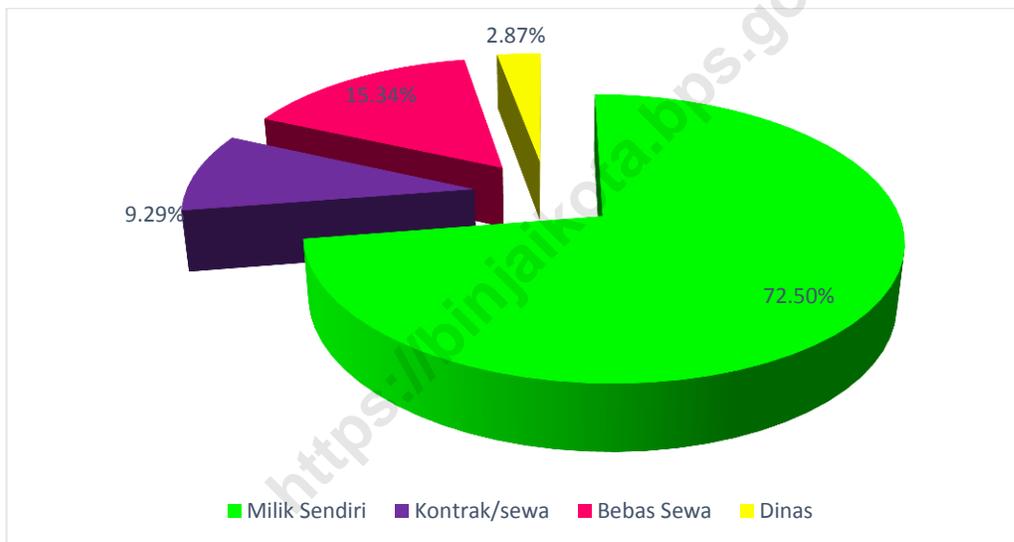
Manusia dan lingkungannya baik fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah dan juga buatan. Untuk melindungi diri dari kondisi alam, manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang dikenal dengan rumah atau tempat tinggal. Oleh sebab itu selain sandang dan pangan, papan (perumahan) juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Sampai saat ini permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya sehingga menyebabkan banyak rumah tangga menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu ditentukan oleh fasilitas rumah yang ada. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya terlihat dari luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan lainnya. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

## 8.1. Kondisi Rumah Tinggal

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumah tangga terhadap rumah yang ditematinya. Dalam beberapa analisis juga dijadikan sebagai pendekatan indikator *backlog* perumahan.

Grafik 8.1. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kota Binjai, 2016



Berdasarkan informasi pada Grafik 8.1, mayoritas rumah tangga di Binjai yakni mencapai sekitar dua per tiga (72,50 persen) mendiami rumah milik sendiri, kemudian 15,34 persen mendiami rumah bebas sewa dan 9,29 persen mendiami rumah kontrak/sewa, sedangkan sisanya (2,87) persen mendiami rumah dinas. Masih besarnya persentase rumah tangga yang belum mendiami rumah milik sendiri inilah yang sering digunakan sebagai acuan dalam target penyediaan rumah di Binjai maupun nasional.

Tingkat kelayakan kondisi tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kondisi rumah tinggalnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan rumah antara lain jenis lantai (bukan tanah), jenis dinding (tembok) dan jenis atap (asbes/seng/genteng). ketiga indikator ini dianggap mempengaruhi keadaan

kesehatan anggota rumah tangga yang juga berdampak pada tingkat kesejahteraannya. Secara umum, semakin besar persentase nilai indikator tersebut berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Tabel. 8.1. Kondisi Perumahan di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016

Uraian (1)	Sumatera Utara (2)	Binjai (3)
1. Rata-rata luas lantai perkapita (M <sup>2</sup> )	21,08	22,79
2. Rumah tangga dengan lantai bukan tanah (%)	97,73	98,81
3. Rumah tangga dengan dinding rumah Tembok (%)	61,20	83,49
4. Rumah tangga dengan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes (%)	96,96	99,47

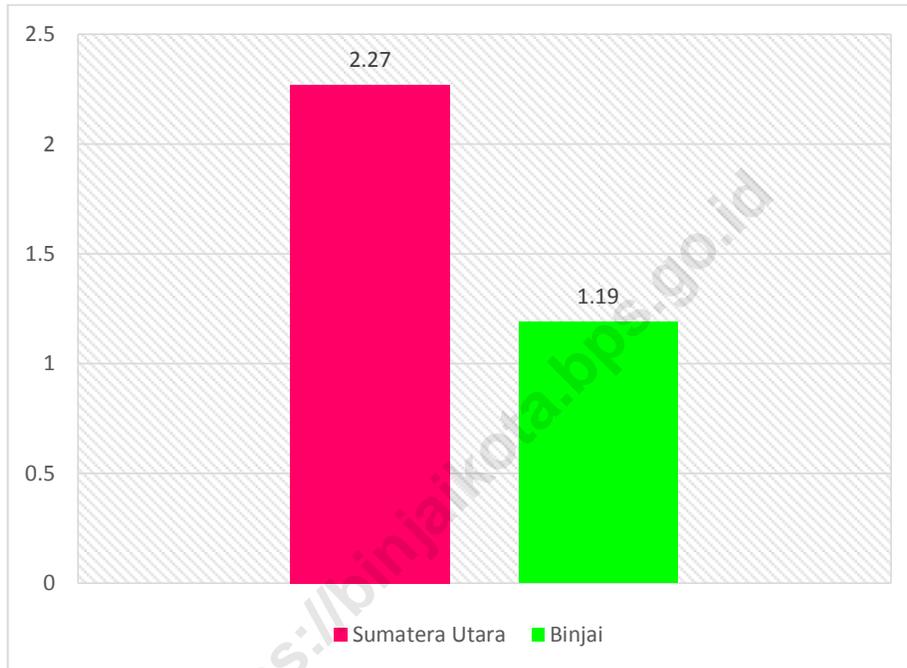
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi perumahan di Sumatera Utara menunjukkan perbaikan. Hal ini diperlihatkan dengan semakin meningkatnya indikator kualitas perumahan. Indikator pertama yang dapat dilihat adalah luas lantai per kapita. Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumah tangga, karena harga tanah yang semakin mahal saat ini. Semakin luas lantai suatu rumah tangga, maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumah tangga. Pada tahun 2016 rata-rata rumah tangga di Binjai memiliki luas lantai per kapita sekitar 22,79 m<sup>2</sup>, sudah diatas Sumatera Utara yang memiliki luas lantai per kapita sekitar 21,08 m<sup>2</sup>.

Selain luas lantai, jenis lantai terluas merupakan indikator kesejahteraan. Jenis lantai terbuat dari tanah tentunya tidak memenuhi syarat kesehatan, karena dapat menjadi bersarangnya kuman-kuman penyakit. Pada grafik 8.2. diketahui bahwa sekitar 1,19 persen rumah tangga di Kota Binjai masih tinggal di rumah dengan lantai tanah, walaupun kondisi tersebut masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yang sebesar

2,27 persen. Kondisi yang memprihatinkan ini masih menjadi pemandangan di daerah perdesaan, sebab masih 3,73 persen rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara tinggal di rumah yang lantainya kurang sehat.

Grafik 8.2. Persentase Rumah tangga yang Mempunyai Lantai Terluas Terbuat dari Tanah di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016



Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan hunian sebuah rumah adalah jenis dinding dan atap. Pada tahun 2016, sekitar 83,49 persen rumah tangga di Kota Binjai tinggal di rumah dengan dinding tembok. Selain tembok bahan lain yang cukup dominan adalah kayu yakni sekitar 10,78 persen. Hampir seluruhnya atau sekitar 99,47 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan atap seng, asbes, genteng, dan beton.

## 8.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisinya tapi juga dari ketersediaan fasilitas penunjang perumahan yang utama di antaranya adalah sumber penerangan utama yang digunakan, kepemilikan fasilitas air minum, dan kepemilikan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik. Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rumah tangga pengguna listrik semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 100 persen rumah tangga di Binjai menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN, sedangkan rumah tangga di Sumatera Utara menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN sebesar 96,84 persen. Hal ini menandakan kondisi Kota Binjai lebih baik dibanding Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 8.2. Kondisi Fasilitas Rumah di Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016

Uraian (1)	Sumatera Utara (2)	Binjai (3)
Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik (%)	96,84	100
Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri (%)	68,60	89,89
Rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air sendiri (%)	81,66	88,93

*Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016*

Selanjutnya dari aspek sumber air minum, dapat dikatakan kondisinya masih belum ideal, namun masih jauh lebih baik dibandingkan Provinsi kondisi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan, sekitar 89,89 persen rumah tangga di Binjai memiliki fasilitas air minum sendiri, sedangkan sisanya menggunakan fasilitas air minum secara bersama-sama dan umum. Sementara Provinsi Sumatera Utara hanya sekitar 68,60 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri.

Selain itu, 88,93 persen rumah tangga di Kota Binjai memiliki fasilitas tempat buang air sendiri, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara hanya 81,66 persen yang memiliki fasilitas tempat buang air sendiri, sisanya adalah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air, menggunakan fasilitas umum, ataupun berbagi dengan rumah tangga lain.

Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016

Sumber Air Minum	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
1. Air kemasan	32,26	53,12
2. Ledeng	13,58	3,74
3. Sumur Bor/Pompa	19,22	2,30
4. Sumur terlindungi	13,37	38,25
5. Sumur tdk terlindungi	5,56	2,37
6. Mata Air terlindung	8,58	-
7. Mata Air tidak terlindungi	3,45	-
8. Air Permukaan/Hujan	3,78	-
9. Lainnya	0,19	0,23

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Sebagian besar rumah tangga di Kota Binjai menggunakan sumber air minum dari air kemasan yaitu mencapai 53,12 persen dan sumur terlindungi 38,25 persen. Di Provinsi Sumatera Utara, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air kemasan (32,26 persen) lebih sedikit dibandingkan Kota Binjai, berbeda dengan penggunaan air ledeng dimana penggunaannya di Kota Binjai lebih sedikit (3,74 persen) dibanding Provinsi Sumatera Utara (13,58 persen). Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari bor/pompa, untuk Kota Binjai lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara.

Selain sumber air minum dan listrik, fasilitas rumah lainnya yang sangat penting adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur). Oleh karena itu tempat penampungan akhir sangat penting bagi kesehatan lingkungan. Tangki septik merupakan pilihan terbanyak rumah tangga di Kota Binjai yaitu sebesar 94,14 persen, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara lebih rendah yaitu sebesar 74,08

persen. Selain itu di Kota Binjai masih terdapat sekitar 3 persen tempat penampungan di lobang tanah/pantai/tanah lapang/kebun serta 1,13 persen tempat penampungan di kolam/sawah/sungai/danau/laut.

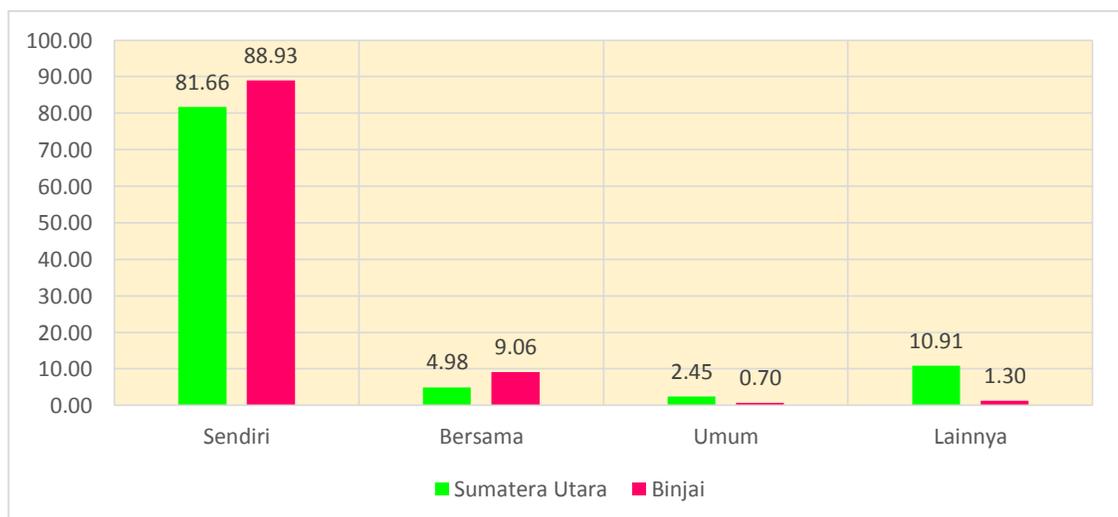
Tabel 8.4. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016

Tempat Penampungan Kotoran/tinja	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
1. Tangki Septik/SPAL	74,08	94,14
2. Kolam/sawah/Sungai/Danau/Laut	11,63	1,13
3. Lobang Tanah/Pantai/Tanah Lapang, Kebun	12,88	3,00
4. Lainnya	1,41	1,73
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Jika dilihat dari status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, sebagian besar rumah tangga di Binjai sudah mempunyai fasilitas sendiri (88,93 persen). Di Sumatera Utara, rumah tangga yang mempunyai fasilitas buang air besar sendiri jauh lebih kecil (81,66 persen) dibandingkan Kota Binjai.

Grafik 8.3. Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016





# **BAB IX**

# **KEMISKINAN**

<https://bit.ly/kotabps-go.id>



# KEMISKINAN

## 9.1. Perkembangan Penduduk Miskin

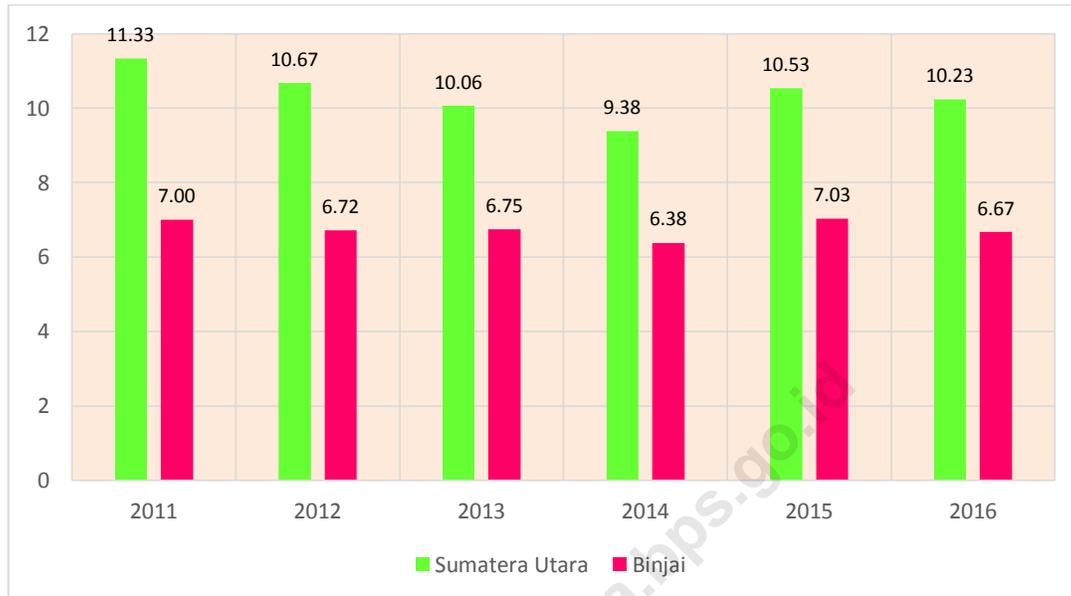
Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, di mana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Binjai beberapa tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin di Binjai sekitar 7 persen, kemudian turun menjadi 6,72 persen pada tahun 2012. Angka ini kemudian meningkat menjadi 6,75 persen pada tahun 2013, menurun lagi pada tahun 2014 menjadi 6,38 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 7,03 dan pada tahun 2016 menurun menjadi 6,67 persen.

Grafik 9.1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2011-2016



Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data pada Tabel 9.1. Pada tahun 2016, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Binjai lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan.

Tabel 9.1. Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2016

Indeks	Sumatera Utara	Binjai
(1)	(2)	(3)
Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ )	1,77	1,33
Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ )	0,49	0,45

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BINJAI**

Jl. WR. Mongonsidi No. 22 Binjai 20714

Telp. (061) 8826571, Fax: (061) 8821146

Homepage: <http://www.binjaikota.bps.go.id>, E-mail : [bps1276@bps.go.id](mailto:bps1276@bps.go.id)

ISBN 978-602-60683-4-7

